

Pendidikan, Algoritma, dan Proklamasi Kemerdekaan Pikiran

Odemus Bei Witono

Direktur Perkumpulan Strada dan Pemerhati Pendidikan

Setiap kali Agustus tiba, wacana kemerdekaan dan pendidikan hampir selalu diulang dengan nada seragam, yakni menagih janji Pembukaan UUD 1945 untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa", meratapi ketimpangan fasilitas, atau mengkritik birokrasi persekolahan.

Diskursus semacam ini tidak salah, tetapi kerap kehilangan kebaruan karena memperlakukan ancaman terhadap kemerdekaan pendidikan sebagai musuh konvensional yang sama: keteringgalan fisik dan kaku-birokrasi.

Hari ini, di hadapan ledakan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan ekonomi perhatian (*attention economy*), bentuk penjajahan terhadap dunia pendidikan telah bergeser secara radikal. Pendidikan kita bukan lagi sekadar terancam oleh ketimpangan infrastruktur, melainkan oleh ancaman yang lebih halus dan tidak kasatmata, yaitu kolonisasi kognitif oleh algoritma.

Jika Ki Hadjar Dewantara merumuskan pendidikan sebagai sarana "memerdekakan manusia secara lahir dan batin", pertanyaan eksistensial bagi Indonesia saat ini adalah masihkah sekolah menjadi tempat persembaian manusia merdeka atau justru telah berubah menjadi pabrik penjinakan kognitif

yang memanjakan kebiasaan berpikir dangkal?

Gerakan pembauran pendidikan melalui jargon "Merdeka Belajar" sejatinya diusung demi membongkar kekakuan birokrasi. Namun, dalam kenyataannya, ketika birokrasi kertas perlahan dikurangi, ruang kelas kita tidak serta-merta menjadi lebih merdeka. Ia justru langsung diinvasi oleh algoritma digital.

Kehadiran AI generatif dan media sosial di ruang-ruang belajar melahirkan paradoks baru. Di satu sisi, akses terhadap informasi melimpah tanpa batas. Di sisi lain, terjadi amputasi massal terhadap daya nalar kritis, kemampuan artikulasi mandiri, dan ketahanan fokus. Murid—bahkan pendidik—kini kian bergantung pada instantitas jawaban yang disediakan oleh mesin.

Proses belajar yang seharusnya menjadi perjumpaan dialektis yang menguji daya penalaran bertransformasi menjadi sekadar transaksi peminjaman teks generatif. Ketika siswa tidak lagi berlatih merumuskan pertanyaan secara mendalam karena jawaban telah disajikan secara instan oleh algoritma, di situlah penjajahan kognitif bentuk baru sedang berlangsung. Kemerdekaan berpikir pelan-pelan diserahkan kepada kecerdasan buatan yang dikendalikan oleh segelintir korporasi teknologi global.

Tantangan ini kian ironis ketika melihat posisi guru dalam lanskap pendidikan modern. Di era yang menuntut guru menjadi pendamping kritis (*critical mentor*) bagi peserta didik yang sedang terpapar disrupsi digital, guru di Indonesia justru masih diposisikan sebagai "buruh administrasi".



HERYUNANTO

Digitalisasi pendidikan yang digadang-gadang memerdekakan guru kerap kali hanya memindahkan beban administrasi dari lembaran kertas ke layar aplikasi. Guru dihabiskan waktunya untuk mengisi prafabrikasi indikator kinerja utama (IKU), memburu sertifikat pelatihan singkat demi poin presensi, dan mengunggah dokumen digital yang melelahkan.

Ketika waktu, energi, dan kapasitas mental guru terkuras dalam memenuhi dahaga kuantitatif sistem aplikasi, ruang untuk berinteraksi secara emosional, filosofis, dan humanistik dengan peserta didik menjadi tandas. Guru kehilangan perannya sebagai intelektual organik—mengutip istilah Antonio Gramsci—yang bertugas membimbing murid membaca realitas sosialnya secara kritis. Pendidik yang terasing dari kemerdekaan dirinya sendiri mustahil mampu menularkan keberanian berpikir merdeka kepada murid-muridnya.

Humanisme dan kesadaran

Menghadapi impian Indonesia Emas 2045, pendidikan nasional harus berani mengambil jarak dari logika tekno-determinisme yang mengagungkan teknologi sebagai satu-satunya pilar kemajuan. Kita membunuh dekolonisasi pikiran dalam tata kelola pendidikan melalui tiga langkah fundamental:

Pertama-tama perlu adanya reorientasi kurikulum, dari *information gathering* ke *critical reasoning*. Di era AI, hafalan dan pencarian informasi teknis tidak lagi memiliki nilai strategis. Kurikulum sudah sepatutnya digeser secara radikal untuk melatih kesadaran kritis (Paulo Freire) berupa kemampuan

mendebat asumsi, menguji etika di balik data, serta membedakan antara fakta, propaganda, dan halusinasi algoritma. Sekolah dapat menjadi benteng pertahanan terakhir bagi kedaulatan penalaran manusia.

Kedua, restorasi otonomi dan martabat bagi pendidik. Negara sangat diharapkan berani memangkas kontrol administratif berlebihan terhadap guru, baik yang berbasis kertas maupun aplikasi. Berikan kembali kebebasan pedagogis kepada guru dalam merancang pembelajaran yang kontekstual dan reflektif. Kesejahteraan guru—khususnya guru honorer—harus diselesaikan secara tuntas sebagai syarat mutlak menegakkan martabat profesi pendidik.

Ketiga, pendidikan sebagai proyek kebudayaan dan ekologi. Pendidikan tidak boleh melulu didefinisikan sebagai alat pencetak tenaga kerja industri (*feedstock for industry*). Ia adalah proyek kebudayaan untuk mengasah empati sosial, kepekaan ekologis, dan pemahaman mendalam atas realitas kebangsaan yang majemuk.

Sebagai catatan akhir, Proklamasi 17 Agustus 1945 telah membebaskan bangsa ini dari belenggu fisik penjajah. Namun, perjuangan menjaga kedaulatan pikiran adalah tugas historis yang tidak pernah selesai. Kemerdekaan pendidikan di era modern tidak diukur dari seberapa canggih gawai yang dipakai di dalam kelas atau seberapa cepat aplikasi digital diadopsi oleh sekolah.

Kemerdekaan pendidikan diuji dari sejauh mana sistem persekolahan kita mampu melahirkan manusia Indonesia yang berani berpikir mandiri, menolak tunduk pada pendangkalan nalar oleh algoritma, dan memiliki kedalaman empati bagi sesama. Tanpa kedaulatan pikiran, kemerdekaan hanyalah perayaan seremonial tanpa jiwa.